**PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS *e-PLANNING* PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG**

**Diah Andani** 1) Email : diah.andani30101992@gmail.com

Magister Administrasi Publik, Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Subang

Jl. RA. Kartini km 03 Subang

**ABSTRAK**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Perencanaan Pembangunan Berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang sesuai dengan Prinsip ideal perencanaan dikemukakan oleh Jamshid Gharajedagi dan Rusell L. Ackoff (dalam Ginandjar Kartasasmita 1997 : 52-53) yaitu Partisipatif, Berkesinambungan, dan Holistik.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Tidak ada pilihan lain daripada menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian utama. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan peraturan dan pengolahan data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Perencanaan Pembangunan Berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang sesuai dengan Prinsip ideal perencanaan dikemukakan oleh Jamshid Gharajedagi dan Rusell L. Ackoff (dalam Ginandjar Kartasasmita 1997 : 52-53) yaitu Partisipatif, bahwa meskipun sejauh ini system digitalisasi telah digunakan, baik proses maupun hasil perencanaan pembangunanitu itu sendiri masih belum benar-benar bisa dilihat oleh masyarakat. Selain daripada itu transparansi dinilai masih semu. Hal ini disebutkan karena system masih dalam proses pengembangan. Berkesinambungan, bahwa beberapa usulan masih dalam bentuk tertulis, tidak seluruh pengajuan di ajukan dalam sistem elektronik. Selama ini pemerintah Kabupaten Subang memfasilitasi SIRENDA sebagai situs yang menampung seluruh ajuan masyarakat, namun seluruh ide dan aspirasi tidak dimuat secara langsung. Holistik, bahwa masih terdapat GAP antara realisasi dengan pengajuan, seharunya ketika telah berbasis elektronik, maka tidak ada GAP temukan. Selain daripada itu trouble jaringan dan sulitnya komunikasi dengan operator perangkat daerah dinilai menjadi sorotan penting bagi pemerintah.

Sesuai dengan Prinsip ideal perencanaan dikemukakan oleh Jamshid Gharajedagi dan Rusell L. Ackoff (dalam Ginandjar Kartasasmita 1997 : 52-53), Perencanaan Pembangunan Berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang Belum Optimal sebagaimana dijelaskan dalam paragraph diatas.

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan

**Pendahuluan**

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik. Pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik lagi, dan perencanaan berfungsi sebagai alat koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk menghasilkan dokumen perencanaan dan untuk mecapai tujuan pembangunan. Perencanaan memiliki peran penting dalam proses pembangunan yaitu sebagai arahan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai.

Berawal dari terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Subang berupaya untuk tertib administrasi dan tepat waktu dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD).

Terbatasnya waktu dan terlalu panjangnya proses penyusunan sesuai permendagri dimaksud membuat Pemerintah Kabupaten Subang melakukan inovasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan tanpa mengurangi keakuratan data serta ketepatan waktu yang diberikan membuat pemerintah Daerah Kabupaten Subang memanfaatkan Teknologi dalam Proses Perencanaan Pembangunan yakni aplikasi berbasis komputer yang dinamakan *e-Planning* guna mendukung dan membantu proses penyusunan perencanaan daerah di Kabupaten Subang

Pada tahun 2016 Kabupaten Subang pertama kali menggunakan Aplikasi *e-Planning* dalam proses penyusunan renstra tahun 2016-2021 yang di sahkan oleh Bupati Subang saat itu yakni Hj. Imas Aryumningsih, SE. Dengan aplikasi *e-Planning* diharapkan mampu menghasilkan Renstra yang berkualitas karena digunakan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan selama lima tahun ke depan agar tujuan dan sasaran perangkat daerah akan sesuai dengan yang direncanakan. Namun pada penerapannya hingga saat ini masih di temukan beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Transparansi dalam perencanaan pembangunan masih belum benar-benar transparan, sehingga dalam hal ini keikutsertaan masyarakat dinilai masih minim karena masyarakat didak dapat mengetahui atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan rumusan perencanaan pembangunan.
2. Masih belum optimalnya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dalam perencanaan pembangunan. Usulan-usulan perencanaan pembangunan dilakukan secara manual dan melalui perwakilan dalam bentuk tertulis melalui pemerintahan tingkat bawah. Sehingga Perencanaan pembangunan membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.
3. Perencanaan pembangunan masih belum terintegrasi, sehingga perencanaan pembangunan masih belum efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Perencanaan Pembangunan Berbasis *e-Planning di Kabupaten Subang”*

**Kajian Pustaka**

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori perencanaan. Perancanaan itu sendiri berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau sesuatu yang akan direncanakan. Perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan, jika tujuan tidak tercapai mungkin di sebabkan karena kurang baiknya perencanaan. Artinya bilamana perencanakan dirumuskan secara tidak baik, maka akan berakibat pada tujuan akhir, sebaliknya jika perencanaan dirumuskan dengan baik maka kemungkinan tujuan yang di capai akan baik pula.

Adapun untuk mengukur penelitian ini, penulis menggunakan Prinsif Perencanaan yang ideal menurut Jamshid Gharajedagi dan Rusell L. Ackoff dalam buku Ginanjar Kartasasmita *“Administrasi Pembangunan”.* Dengan 3 prinsif, yakni sebagai berikut :

1. Partisipatif

Prinsip partisipatif menunjukan bahwa rakyat atau Masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain Masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil *(product)* perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

1. Berkesinambungan

Prinsip berkesinambungan menunjukan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti tidak pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran *(relapse)*. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.

1. Holistik

Prinsip holistik menunjukan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

**Metodelogi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian tipe deskriptif adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam, maka digunakan kualitatif.

Jenis dan sumber datanya yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yang dapat berupa tanggapan, saran, kritik, pernyataan, dan penilaian dari informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah *stakeholder* di kantor BP4D Kabupaten Subang. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, melakukan analisis menafsirkan data dan menulis laporan.

Berdasarkan kriteria keabsahan data diataspenulis menggunakan kriteria kepercayaan *(credibility).* Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipakai untuk memeriksa validitas data ini adalah pemeriksaan triangulasi. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data skunder akan disusun dan disajikan serta dianalisismelalui reduksi data, penyajian data, Penarikan kesimpulan atau vertifikasi.

**Hasil dan Pembahasan**

Dalam analisis pembahasan bab ini penulis akan menjelaskan tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang Menggunakan Prinsif Perencanaan menurut Jamshid Garajedagi dan Russel Ackoft (dalam Ginandjar Kartasasmita 1997:52-53) yang terdiri dari tiga prinsif yakni Partisipatif, Berkesinambungan dan Holistik.

 Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan berbasis *e-Planning*  di Kabupaten Subang dinilai belum sepenuhnya diterapakan, baik proses maupun hasil perencanaan pembangunanitu itu sendiri masih belum benar-benar bisa dilihat oleh masyarakat, bisa di katakana pula jika transparasi terkait perencanaan pembangunan juga dinilai masih semu meski sistem digitalisasi telah di terapkan. Hal ini bisa dilihat dari akses situs perencanaan pembangunan yang hanya bisa di li diakses oleh operator perangkat daerah saja. Berikut penulis tampilkan tangkapan gambar bapa situs SIRENDA Kabupaten Subang.

Gambar 4.1

Tampilan Situs Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Subang



*Sumber :* [*http://sirenda.subang.go.id/*](http://sirenda.subang.go.id/)

 Dari gambar tampilan situs sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang terbukti ketika mengakses situs diharuskan log in terlebih dahulu, dan mereka yang bisa log in hanyalah operator perangkat daerah saja, dimana tiap tiap daerah memiliki 1 operator SIRENDA. Sehingga hal ini di nilai sebagaimana termaksud, bahwa seluruh masyarakat masih belum bisa melihat dengan pasti baik proses maupun hasil daripada perencanaan pembangunan itu sendiri, adapun Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembaaangggunan sebagai mana selama ini kita ketahui bersama yakni melalui Musrembang.

prinsif berkesinambungan dalam proses Perencanaan Pembangunan berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang dinilai belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa usulan masih dalam bentuk tertulis, tidak seluruh pengajuan di ajukan dalam sistem elektronik, Selama ini pemerintah Kabupaten Subang memfasilitasi SIRENDA sebagai situs yang memantau seluruh ajuan masyarakat, namun seluruh ide dan aspirasi tidak Masyarakat tidak dimuat secara langsung dalam situs. Adapun sistem digitalisasi digunakan ketika pengajuan telah di buat kemudian baru di unggah dalam situs SIRENDA, dan tidak semua perangkat daerah melakukan input. Hal ini juga di sebut sebut sebagai kendala lainnya dimana tidak semua operator perangkat daerah cepat memahami, sehingga pelatihan dan bimbingan teknik diperlukan. Pengajuan tingkat desa adalah siklus perencanaan pembangunan paling awal sebelum pada akhirnya pengajuan sampai di kecamatan, kabupaten hingga di distribusikan kepada Dinas. Dan perangkat desa merupakan sumber aspirasi paling dekat dengan masyarakat, namun kenyataannya bentuk pelatihan terhadap operator perangkat desa setelah penulis telusuri juga disebut sebut belum ada pelatihannya, sehingga sistem perencanaan pembangunan berbasis digitalisasi penulis sebutkan belum benar benar sesuai dengan harapan termaksud.

prinsif holistik dalam proses Perencanaan Pembangunan berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang dinilai belum baik. Hal ini dikarekankan beberapa kendala tidak bisa di hindarkan seperti masalah jaringan dan komukasi, baik antara BP4D dengan perangkat daerah yang di bawah, maupun perangkat daerah yang di atas. Selain itu segala bentuk pengajuan dengan realisasi terkadang masih terdapat GAP, seharunya ketika telah berbasis elektronik, maka kesalahan seperti ini tidak lagi di temukan. Hasil daripada perencanaan pembangunan itu sendiri juga masih dalam bentuk tertulis, rencana ajuan masih dalam bentuk format excel.

**Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai temuan penelitian yaitu bahwa perencanaan pembangunan berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang dinilai belum optimal, hal ini dikarekan meskipun sejauh ini sistem digitalisasi telah digunakan, baik proses maupun hasil perencanaan pembangunanitu itu sendiri masih belum benar-benar bisa dilihat oleh masyarakat. Selain daripada itu transparansi dinilai masih semu. Dimana hanya operator tiap tiap perangkat daerah saja yang mampu melihat perencanaan pembangunan itu sendiri.
2. Beberapa usulan masih dalam bentuk tertulis, tidak seluruh pengajuan di ajukan dalam sistem elektronik. Selama ini pemerintah Kabupaten Subang memfasilitasi SIRENDA sebagai situt yang memau seluruh ajuan masyarakat, namun seluruh ide dan aspirasi tidak dimuat secara langsung.
3. Segala bentuk pengajuan dengan realisasi terkadang masih terdapat GAP, seharusnya ketika telah berbasis elektronik, maka kesalahan seperti ini tidak lagi di temukan. Selain daripada itu trouble jaringan dan sulitnya komunikasi dengan operator perangkat daerah dinilai menjadi sorotan penting bagi pemerintah.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan terhadap permasalahan yang di kemukakan sebelumnya, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diperlukan pengembangan sistem secepatnya agar masyarakat benar-benar bisa melihat proses perencanaan pembangunan, selain daripada itu transparansi harus lebih di tingkatkan lagi guna mengajak Masyarakat Kabupaten Subang untuk turut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan yakni dengan membiarkan seluruh masyarakat bisa mengakses situs dan melihat secara jelas proses perencanaan pembangunan.
2. Jika sistem sudah berbasis elektronik sebaaiknya segala bentuk pengajuan dilakukan secara digitalisasi sehingga tidak di perlukan lagi adanya ajuan tertulis yang akan memakan banyak waktu. Selain daripada itu pelatihan untuk seluruh operator perangkat daerah hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga tidak adalagi alas an operator tidak bisa mengoprasikan sistem.
3. Kendala dari sistem perencanaan pembangunan berbasi manual adalah terdapatnya GAP antara pengajuan dengan realisasi, dengan adanya sistem elektronik seharunya tidak adalagi kesenjangan antara pengajuan denganrealisasi, jika masih terdapat GAP, dalam hal ini pemerintah harus mengkaji lebih dalam lagi dan segala trouble bisa diminimalisir.

**Daftar Pustaka**

Abiyar, Muharika. 2019. *Metodelogi Penelitian Evaluasi Program.* Bandung : Alfabeta.

Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif.* Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.

Arifin, Zainal. 2019. *Evaluasi Program (Teori dan Praktek Dalam Konteks Pendidikan dan Non Pendidikan).* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Baratakusumah, Deddy Supriyadi & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Budi, Sutejo. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi.* Yogyakarta : Ande Offset.

Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar.* Jakarta : PT. Rosda.

Fahmi, Irham. 2018. *Perilaku Organisasi ( Teori, Aplikasi, dan Kasus).* Bandung : Alfabeta.

Gharajedaghi, Jamshid dan Rusell L. Ackoff. (eds). 1986. *Prologue To National Development Planning.* New York : Greenwood Press.

Hasibuan, Melayu S.P. 2006. *Manajemen : Dasar, Pengertian, Dan Masalah.* Jakarta : PT Bumi Aksara.

Indrajit. Richardus. 2006. *Elecronic Government.*  Yogyakarta : Andi Offset.

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan.* Jakarta : LP3ES

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan*

*Pertumbuhan Dan Pemerataan.* Jakarta : Pustaka Cidesindo.

Kartasasmita, Ginandjar. 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan*

*Pertumbuhan Dan Pemerataan.* Jakarta : Pustaka Cidesindo.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan*

*Pertumbuhan Dan Pemerataan.* Jakarta : Pustaka Cidesindo.

Kunarjo. 1993. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan.* Jakarta :

Penerbit Universitas Indonesia.

Lewis, Arthur. 1966. *Perencanaan Pembangunan (Dasar-dasar Kebijakan*

*Eknomi).* Jakarta : Kadar Jaya Offset.

Moekijat. 1980. *Kamus Management.* Bandung : Penerbit ALUMNI.

Moch. Nazir. 3003. *Metode Penelitian.* Jakarta :Salemba Empat.

Moleong. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial.* Jakarta : PT. Rineka Cipta

Mulyadi, Tjokrowinoto. 1999. *Konsep Pembangunan Nasional.* Yogyakarta : Liberty.

Mudrajad, Kuncoro. 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah.* Jakarta : PT. Grasindo.

Ramli,Rusli. 2014. *Asas-Asas Manajemen.* Banten : Universitas Terbuka

Ridwan, Nasar Baso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Bandung : Alfabeta.

Rukamana, Nana. Steinberg, Florian. Van der hoff, Robert. 1995. *Manajemen pembangunan prasarana perkantoran.* Jakarta : LP3ES.

Riyadi dan Deddy Supriyadi Baratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sabardi, Agus. 2001. *Manajemen Pengantar.* Yogyakarta : akademi manajemen perusahaan YKPN.

Siagian, Sondang. 1994. *Organisasi, Kepemimpinan, Prilaku Administrasi.*

Jakarta :P CV Haji Mas.

Siagian, Sondang. 2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia.* Jakarta : Radar Jaya`

Siagian, Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen.* Jakarta : PT Bumi Aksara.

Siagian, Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan : Konsep. Dimensi, dan Strateginya.* Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Silalahi, Ulbert. 2016. *Asas-Asas Manajemen.*  Bandung : PT Refika Aditama

Sjafrizal. 2017.  *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi.* Depok : PT. Rajagrafindo Persada.

Suebu, Barnabas. 2010. *Pembangunan Kampung.* Papua : Pemerintah Provinsi Papua.

Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Sugijanto, Soegijoko. 1997. *Perencanaan Pembangunan Di Indonesia.* Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance.* Jakarta :

 Yayasan Obor Indonesia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D.* Bandung :

ALFABETA

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung : ALFABETA

Tarigan, Robbinson.2015. *Perencanaan Pembangunan Wilayah.* Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1993. *Kebijaksanaan Dan Administrasi Pembangunan : Perkembangan Teori Dan Penerapan.* Jakarta : LP3ES

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Admisitrasi Pembangunan.* Jakarta : LP3ES

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan.* Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Torang, Syamsir.2013. *Organisasi Dan Manajemen.*  Bandung : ALFABETA

Trigunarso, Sri Indra. Mahi, Ali Kabul. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi).* Depok : PT. Kencana

Ukas, Maman. 2010.*Manajemen :Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Bandung : Agnini

Wasistiono, Sadu. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan* . Bandung : IPDN Press.

**Dokumen :**

Undang-undang no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Peraturan Menteridalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2008 tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

**Sumber Internet :**

<http://www/wikipedia.org.id>